

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
DAN LATAR BELAKANG POLITIK TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024)

Rezi Indriani

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Korespondensi penulis: rezi280618@gmail.com

Juita Sukraini

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Email: jjuitasukraini@gmail.com

Siska Yulia Defitri

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Email: siskayd023@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the Influence of the Council on the Budget (X1) on Regional Financial Supervision (Y), the Effect of Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y), and the Simultaneous Effect of the Council's Knowledge of the Budget (X1) and Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of the study indicate that there is no effect of the Council's Knowledge of the Budget (X1) on Regional Financial Supervision (Y). The results of testing the first hypothesis are proven by the value of $|t_{hitung}|$ of $0.987 < 1.682$ and the significance of t is $0.330 > 0.05$. After that, there is no influence of Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of testing the second hypothesis are proven by the value of $|t_{hitung}| - 0.027 < 1.682$ and the significance of t is $0.978 > 0.05$. In addition, there is no simultaneous influence of the Council's Knowledge of the Budget (X1) and Political Background (X2) on Regional Financial Supervision (Y). The results of this third test are proven by $|F_{hitung}| 0.837 < 3.23$ and a significance value of $0.440 > F$ of 0.05 .*

Keywords: *Board Knowledge About Budget (X1), Political Background (X2), Regional Financial Supervision (Y)*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), Pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), dan Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis pertama ini dibuktikan dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $0,987 < 1,682$ dan signifikansi t sebesar $0,330 > 0,05$. Setelah itu, tidak terdapat pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil

pengujian hipotesis kedua ini dibuktikan dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $-0,027 < 1,682$ dan signifikansi t sebesar $0,978 > 0,05$. Selain itu, tidak terdapat pengaruh secara simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian hipotesis ketiga ini dibuktikan dengan $|F_{hitung}|$ sebesar $0,837 < 3,23$ dan nilai signifikansi F sebesar $0,440 > 0,05$.

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1), Latar Belakang Politik (X2), Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkan undang-undang pemerintah daerah tentang otonomi daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditunjukkan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengelolaan dari APBD tersebut. Maka dari itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) (Yuliani, 2021).

Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebagai pengontrol arah kebijakan keuangan daerah yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD dapat berwujud dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen (masyarakat), tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis (Yuliani, 2021). Selain itu, berdasarkan Pasal 191 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota menyebutkan lembaga legislatif (DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi legislasi (pembuatan perundang-undangan), (2) Fungsi anggaran (menyusun anggaran), (3) Fungsi pengawasan (mengawasi kinerja eksekutif) (Arifin, 2018).

Pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu pengetahuan dari anggota dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah, karena

anggota dewan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran agar seluruh anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran tentang anggaran (Arvitaningrum & Taman, 2019). Pengetahuan dewan tentang anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan mengenai anggaran yang banyak mengenai APBD. Selain itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan mengenai pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian dari (Darma & Hasibuan, 2012) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, para anggota DPRD harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, pengetahuan yang cukup tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan dalam menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif agar setiap anggota DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik (Darma & Hasibuan, 2012). Hasil penelitian dari (Nugraha, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah, selain itu, hal ini juga berarti bahwa anggota dewan yang memiliki pengetahuan tentang mekanisme anggaran akan mempengaruhi peranannya dalam mengawasi keuangan daerah (Nugraha, 2021).

Selain itu, faktor yang mempengaruhi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah latar belakang politik. Latar belakang politik merupakan pengalaman seseorang yang berkarir di dunia politik yang mana, disini adalah anggota DPRD. Orang yang memiliki pengalaman di bidang politik akan cenderung sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena telah memiliki banyak pengalaman yang didapatkan saat berada dalam organisasi sebelumnya. Latar belakang politik merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah. Setiap anggota dewan memiliki latar belakang politik yang berbeda didalamnya. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), partai politik (parpol) berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta para anggota calon legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat (Sari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Samsiati, 2013) menunjukkan bahwa latar belakang politik berpengaruh terhadap pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena sebagian besar responden memiliki latar belakang politik yang sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal ini adalah peran dan kerja anggota DPRD yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya

masing-masing, disinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan (Samsiati, 2013). Selain itu, hasil penelitian dari (Sari, 2016) menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap terhadap pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lama atau tidaknya seorang anggota dewan memiliki pengalaman di bidang politik tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah (Sari, 2016).

Telah banyak penelitian dengan konteks yang sama yang meneliti hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah. Namun penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau bertentangan. Hasil penelitian dari (Utami & Sofyan, 2013) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memberikan peningkatan pada pengawasan keuangan daerah, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan bidang pendidikan anggota dewan yang beragam (Utami & Sofyan, 2013).

Hasil penelitian dari (Kartikasari, 2012) menunjukkan bahwa latar belakang politik berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, anggota DPRD dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda di bidang politik, seperti pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi (Kartikasari, 2012). Sedangkan hasil penelitian dari (Hidayah, 2020) menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas. Walaupun ideologi setiap fraksi berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural budaya organisasi, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan (Hidayah, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Apakah Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Apakah Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Latar Belakang Politik berpengaruh secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan pengaruh Latar Belakang Politik secara simultan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi anggota dewan dalam meningkatkan kinerja fungsi pengawasan DPRD terhadap keuangan daerah.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan anggota DPRD di daerahnya berdasarkan latar belakang politik dan pengetahuan tentang anggaran daerah dalam hal pengawasan keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah adalah Pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap APBD dimulai pada saat penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD (Hartono, 2016). Pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, 2012;37). Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2012;39). Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang bertujuan untuk menjamin suatu kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah disepakati (Hartono, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan pemerintahan tersebut pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan legislatif, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Penegasan tentang tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan keuangan daerah juga diatur dalam Pasal 154 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dari APBD kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

2.2 Latar Belakang Politik

Latar Belakang Politik yaitu latar belakang dari pengalaman individu anggota DPRD dalam berkecimpung di dunia politik (Hidayah, 2020). Latar belakang politik yang diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik. Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat di peroleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Semua kerja-kerja itu telah membentuk nilai, memberikan pengalaman dan pengetahuan tersendiri bagi anggota legislatif di ranah politik (Hidayah, 2020).

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat (Rais, 2016). Latar belakang politik meliputi pengalaman anggota dewan di partai politik, jabatan di partai politik, latar belakang partai politik, dan sejauh mana kepentingan partai diutamakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota dewan harus memiliki latar belakang politik yang baik, hal tersebut memengaruhi kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) (Rais, 2016).

2.3 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran (Putra, 2016). Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran adalah pengetahuan anggota DPRD terkait anggaran yang direncanakan, disahkan, dan dikelola oleh pemerintah daerah (Hidayah, 2020). Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses penganggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dan pengawasan kinerja eksekutif dalam melaksanakan APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu pengetahuan dewan terhadap mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban (Utami & Sofyan, 2013).

Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerjanya sebagai pengawas keuangan daerah. Pengetahuan ini dapat membantu anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini dapat diperoleh dari pelatihan dan seminar yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki anggota DPRD. Fungsi penganggaran memberikan hak kepada anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif dan memberikan wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, DPRD memegang kontrol penuh agar kinerja dan pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada kecurangan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;18). Untuk pendekatan asosiatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;18).

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;78). Data primer tersebut bersumber/diperoleh dari hasil pengisian kuesioner/angket yang dibagikan pada responden. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui survei dengan turun langsung ke lapangan dan membagikan kuesioner (angket) kepada para responden. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data (instrumen penelitian) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden untuk mendapatkan jawaban (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;93).

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi bukan hanya orang melainkan juga bisa organisasi, binatang, hasil karya manusia, dan benda-benda alam yang lainnya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;66). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024 yang mana DPRD Kabupaten Solok beranggotakan 35 orang dan DPRD Kota Solok beranggotakan 20 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi, atau meneliti sebagian dari elemen populasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016;67). Untuk teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *total sampling*. *Total Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai responden atau sampel (Sekaran, 2013;241). *Total sampling* digunakan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang berjumlah 35 orang dan seluruh anggota DPRD Kota Solok periode 2019-2024 yang berjumlah 20 orang, sehingga jumlah sampel seluruhnya 55 orang.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses pengelompokan data yang berdasarkan variabel dan jenis responden. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi *SPSS Versi 26*. *SPSS (Statistical Package for Social Sciences)* merupakan aplikasi komputer yang berguna untuk menganalisis data, melakukan perhitungan

statistik baik statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis *windows* (Ghozali, 2018;15).

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2018;51). Untuk mengukur validitas penelitian ini dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansinya dilakukan dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* dengan Signifikansi untuk degree of freedom (df)= $n - 2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Jika butir atau pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai *Pearson Correlation* lebih besar dari Signifikansi dan dinilai positif berarti daftar pertanyaan kuesioner bisa digunakan untuk mengolah data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsiisten atau stabil dari waktu ke waktu, Ghozali (2018;46). Pada pengukuran reliabilitas, penelitian menggunakan teknik *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran *One Shot* hanya sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (). Kriteria dalam pengujian reliabilitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$,

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan (Ghozali, 2018;161).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018;107).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018;137).

3.6.3 Analisis Angresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda dengan bantuan komputer melalui program *SPSS Versi 26 for Windows*. Regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + E$$

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. (Ghozali, 2018;98) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variabel independen, (Ghozali, 2018;179). Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$ untuk *degree of freedom* (df) = n - 2.

3.6.5 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel independen, Ghozali (2018;97). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Nilai *Adjusted* (R^2) dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataannya *Adjusted* (R^2) dapat bernilai negatif, meskipun yang diinginkan harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat *Adjusted* (R^2) negatif, maka nilai *Adjusted* (R^2) dianggap bernilai nol. Secara matematis jika (R^2) = 1, maka *Adjusted* (R^2) = (R^2) = 1 sedangkan jika nilai *Adjusted* (R^2) = 0, maka *Adjusted* (R^2) = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka nilai *Adjusted* (R^2) akan bernilai negatif, Ghozali (2018;97)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

4.1.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur variabel di katakan valid atau tidak suatu kuesioner. Berikut tabel hasil uji validitas dari masing-masing

variabel penelitian ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1)

Nomor Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1.1	0,705	0,3008	Valid
X1.2	0,724	0,3008	Valid
X1.3	0,775	0,3008	Valid
X1.4	0,842	0,3008	Valid
X1.5	0,648	0,3008	Valid
X1.6	0,550	0,3008	Valid
X1.7	0,809	0,3008	Valid
X1.8	0,850	0,3008	Valid
X1.9	0,715	0,3008	Valid
X1.10	0,769	0,3008	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 item pernyataan X1 yang dikatakan valid, dimana *Pearson Correlation* masing-masing item pernyataan lebih besar dari *Sig. (2-tailed)*. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa *Pearson Correlation* > *Sig. (2-tailed)* 0,3008, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut tabel hasil uji validitas variabel X2:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Latar Belakang Politik (X2)

Nomor Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X2.1	0,671	0,3008	Valid
X2.2	0,695	0,3008	Valid
X2.3	0,672	0,3008	Valid
X2.4	0,595	0,3008	Valid
X2.5	0,836	0,3008	Valid
X2.6	0,814	0,3008	Valid
X2.7	0,622	0,3008	Valid
X2.8	0,744	0,3008	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 item pernyataan X2 yang dikatakan valid, dimana *Pearson Correlation* masing-masing item pernyataan lebih besar dari *Sig. (2-tailed)*. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa

Pearson Correlation > *Sig. (2-tailed)* 0,3008, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Berikut tabel hasil uji validitas variabel Y:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Nomor Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Y.1	0,385	0,3008	Valid
Y.2	0,561	0,3008	Valid
Y.3	0,433	0,3008	Valid
Y.4	0,432	0,3008	Valid
Y.5	0,471	0,3008	Valid
Y.6	0,347	0,3008	Valid
Y.7	0,481	0,3008	Valid
Y.8	0,134	0,3008	Tidak Valid
Y.9	0,442	0,3008	Valid
Y.10	0,392	0,3008	Valid
Y.11	0,736	0,3008	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 11 item pernyataan Y yang dikatakan valid dan terdapat 1 item yang tidak valid, dimana *Pearson Correlation* masing-masing item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa *Pearson Correlation* > *Sig. (2-tailed)* 0,3008, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan *Pearson Correlation* < *Sig. (2-tailed)* 0,3008, maka data tersebut tidak valid, dengan tidak validnya data Y.8, maka data tersebut di buang dan dilakukan kembali pengujian kedua uji validitas variabel Y, berikut uji validitas variabel Y pengujian kedua:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
(Pengujian Kedua)

Nomor Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Y.1	0,401	0,3008	Valid
Y.2	0,528	0,3008	Valid
Y.3	0,467	0,3008	Valid
Y.4	0,478	0,3008	Valid
Y.5	0,457	0,3008	Valid
Y.6	0,375	0,3008	Valid
Y.7	0,537	0,3008	Valid
Y.9	0,461	0,3008	Valid
Y.10	0,355	0,3008	Valid
Y.11	0,715	0,3008	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 item pernyataan Y yang dikatakan valid, dimana *Pearson Correlation* masing-masing item pernyataan lebih besar dari *Sig. (2-tailed)*. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa *Pearson Correlation* > *Sig. (2-tailed)* 0,3008, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabelnya suatu kuisioner. Berikut tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability Statistics		Keterangan
	Cronbach's Alpha	N of Items	
X1	0,894	10	Reliabel
X2	0,828	8	Reliabel
Y	0,609	10	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,894 > 0,60. Sedangkan variabel X2 memiliki nilai *Cronbach's*

α 0,828 > 0,60. Sedangkan variabel Y memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,609 > 0,60. Berdasarkan data tersebut, maka seluruh variabel penelitian bernilai reliabel.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal. Berikut tabel uji normalitas dari penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58961007
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.075
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0.082. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal, dimana hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* 0.082 > 0.05. Dengan data berdistribusi normal, maka data penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikolinieritas

Uji mutikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut tabel uji multikolinieritas dari penelitian ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,561	1,782
	X2	,561	1,782

a. Dependent Variable: Y

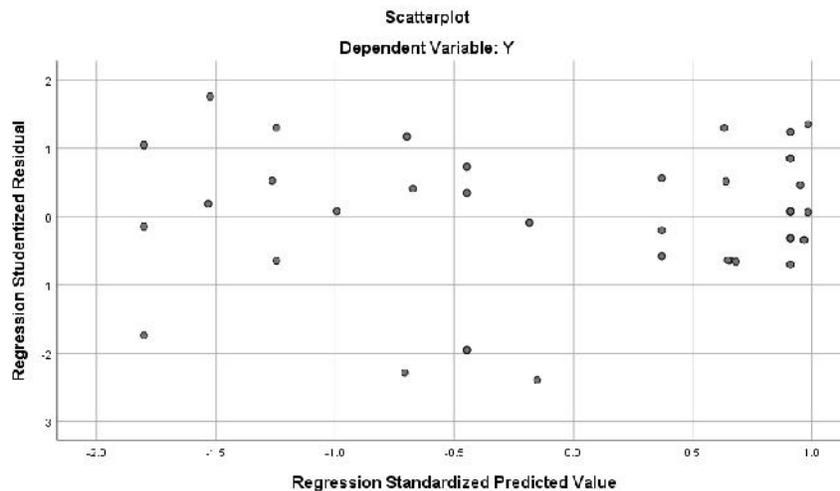
Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* sebesar $0,561 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,782 < 10$. Dengan hal ini, dapat diketahui bahwa dalam variabel penelitian ini, tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut tabel uji heteroskedastisitas dari penelitian ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak tersebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dsapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastistas, sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan. Berikut tabel analisis regresi linear berganda dari penelitian ini:

Tabel 4.8
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35,625	5,367		6,637	,000
	X1	,147	,149	,204	,987	,330
	X2	-,004	,163	-,006	-,027	,978
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 35,625 + 0,147 X1 - 0,004 X2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 35,625 mengindikasikan bahwa jika variabel Independen yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) bernilai nol, maka Pengawasan Keuangan Daerah (Y) bernilai positif sebesar 35,625 satuan.
2. Koefisien Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) sebesar 0,147 mengindikasikan bahwa setiap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) meningkat 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,147 satuan, dengan asumsi Latar Belakang Politik (X2) bernilai tetap atau nol.
3. Koefisien Latar Belakang Politik (X2) sebesar - 0,004 mengindikasikan bahwa setiap Latar Belakang Politik (X2) meningkat 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,004 satuan, dengan asumsi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) bernilai tetap atau nol.

4.1.4 Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Hasil perhitungan tabel uji t dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35,625	5,367		6,637	,000
	X1	,147	,149	,204	,987	,330
	X2	-,004	,163	-,006	-,027	,978

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

- a. Untuk hipotesis pertama (H1) yaitu pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), hipotesis pertama ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan $|t_{hitung}|$ sebesar $0,987 < 1,682$ dan nilai signifikansi t sebesar $0,330 > 0,05$.
- b. Untuk hipotesis kedua (H2) yaitu pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y), hipotesis kedua ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $-0,027 > 1,682$ dan signifikansi t sebesar $0,978 > 0,05$.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau bergabung mempengaruhi variabel independen. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,786	2	5,893	,837	,440 ^b
	Residual	281,655	41	7,041		
	Total	293,442	43			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu terdapat pengaruh simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai $|F_{hitung}|$ sebesar $0,837 < 3,23$ dan signifikansi F sebesar

0,440 > 0,05.

4.1.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Hasil pengelolaan data untuk mengetahui koefisien determinasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,200 ^a	,040	-,008	2,654
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 26.00 (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R Square* (keofisien determinasi) sebesar 0,040 atau 4,00%. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) yaitu sebesar 4,00%, sedangkan sisanya sebesar 96,00% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti *Personal Background* (Kartikasari, 2012), Partisipasi Masyarakat (Akmal, 2013), Komitmen Organisasi (Hidayah, 2020), dan lain sebagainya.

4.1.6 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pertama (H1) dapat diketahui yaitu tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $0,987 < 1,682$ dan signifikasi sebesar $0,330 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari ((Nugraha, 2021) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan dewan tentang anggaran ini dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, maka tidak akan mempengaruhi pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah.

2. Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis kedua (H₂) dapat diketahui yaitu adanya pengaruh Latar Belakang Politik (X₂) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $-0,027 < 1,682$ dan signifikansi sebesar $0,978 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2016) yang menunjukkan bahwa Latar Belakang Politik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Kartikasari, 2012) yang menunjukkan bahwa Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Latar Belakang Politik yaitu latar belakang dari pengalaman individu anggota DPRD yang berkecimpung di dunia politik. Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka tidak akan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD.

3. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis ketiga (H₃) dapat diketahui yaitu adanya pengaruh secara simultan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X₁) dan Latar Belakang Politik (X₂) terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan $|F_{hitung}|$ sebesar $0,837 < 3,23$ nilai signifikansi sebesar $0,440 > 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari ((Nugraha, 2021) yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, 2016) yang menunjukkan bahwa Latar Belakang Politik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari (Kartikasari, 2012) yang menunjukkan bahwa Latar Belakang Politik berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Latar Belakang Politik yaitu latar belakang dari pengalaman individu anggota DPRD yang berkecimpung di dunia politik. Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang

anggaran, semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka tidak mempengaruhi pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $0,987 < 1,682$ dan nilai signifikansi sebesar $0,330 > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, maka tidak mempengaruhi pengawasan anggota DPRD terhadap keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, yaitu Latar Belakang Politik (X2) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai $|t_{hitung}|$ sebesar $-0,027 < 1,682$ dan signifikansi sebesar $0,978 > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka semakin meningkatkan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, yaitu Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X1) dan Latar Belakang Politik (X2) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai $|F_{hitung}|$ sebesar $0,837 < 3,23$ dan signifikansi sebesar $0,440 > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, dan semakin banyak pengalaman di bidang politik dan organisasi politik, kerja-kerja politik anggota DPRD, maka tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD.

5.2 Saran

1. Untuk DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kota Solok, agar memperbanyak strategi-strategi dalam meningkatkan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran daerahnya masing-masing agar pengawasan keuangan daerah menjadi lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengganti, menambah, variabel penelitiannya, sesuai dengan kebutuhan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak instrumen penelitian agar dalam melakukan pengukuran pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dapat berjalan efektif, dan hasil pengukurannya bisa lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota Di Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi 1 (1).
- Arifin, Zainal. 2018. *Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi.
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan APBD Di Kabupaten Klaten*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 8(2), 224-238.
- Bereki, I., & Marwa, S. 2020. *Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderasi*. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(1), 10-23.
- Darma, Jufri, dan Ali Fikri Hasibuan. 2012. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating." Jurnal
- Ghozali, Imam. 2017. *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Iqbal, Muhammad. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hartono, Rengki Ramang. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Jember)." Skripsi.
- Hendrawaty, Ernie. 2017. *Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan*. Bandar Lampung: AURA.
- Hidayah, C. 2020. *Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019*. Skripsi.
- Kartikasari, D. 2012. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. Accounting Analysis Journal, 1(1).
- Kurniawan, Agung Widhi & Zarah Puspitaningtyas. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif". Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Nainggolan, E. P. 2015. *Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran*. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 14(2).
- Nasution, Darma, Aditia, Dito. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Nugraha, Hazel Muhammad. 2021. “*Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Solok Dan DPRD Kota Solok Periode 2019-2024).*” Skripsi.
- Putra Nugra Kencana, Vidya. 2016. “*Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal).*” Naskah Publikasi.
- Rais, R. G. P. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRK Kabupaten Aceh Utara).* Tesis.
- Ramdhani, Dadan. 2014. “*Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Serang Banten.*” *Jurnal Akuntansi* 18 (2): 302–21.
- Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah.
- Samsiati, S. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Luwu).* Skripsi.
- Sari, Dwiva Ulan. 2016. “*Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok).*” *Jurnal Akuntansi* 4 (1).
- Sari, Imelda. 2017. *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.* *Majalah Sainstekes*, 4(2).
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2.* Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, K., & Syofyan, E. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.* *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 63-86.
- Yuliani, W. S. 2021. *Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi).* *Juhanperak*, 2(2), 903-913.
<https://www.patronnews.co.id/2021/06/dinilai-arogan-dan-otoriter-7-fraksi.html>
<https://www.patronnews.co.id/2022/02/hak-angket-dprd-kota-solok-bergulir.html>